

Dinamika Sistem Kesejahteraan dan Modal Sosial di Masyarakat Banjar Pakraman-Bali

I Ketut Meniarta¹, Wawan Mas'udi², AAGN Ari Dwipayana³

Abstract

This study explores and uncovers the welfare system of Banjar Pakraman-Bali community existing nowadays, and then the history and development are observed. Besides that, there is also observation on state welfare systems and the market worked in Banjar Pakraman community and its interaction. Due to welfare is a complex matter, then this study only focused on the fulfillment of public main necessities in order to specify the discussion.

The result suggests that community of Banjar Pakraman Batannyuh has a welfare system which was practiced since long time ago. This system is based on Menyama Braya and Suka Duka values, its institutions form of Keliran, Dadia and Sekehe besides through mechanisms of mutual cooperation, arisan, contribution and giving each other. The main principle of this system is even redistribution and balance without differentiating economic status of community, thus it is not pro poor. When public condition is homogenous, this system is effective to bring public welfare into reality. Whereas, with the heterogeneity in community and high

-
- 1 I Ketut Meniarta bekerja di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali. Ia bisa dihubungi di meni_belayu@yahoo.com.
 - 2 Wawan Mas'udi adalah Staff Pengajar di Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
 - 3 AAGN Ari Dwipayana adalah Staff Pengajar di Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

discrepancy due to market system inducing makes this system become not effective. Even this system burdens public.

On the other hand, state welfare system also reaches the community life of Banjar Pakraman. This system which derived from state is not replacing welfare system of Banjar Pakraman, but there is a variation on relation patterns, it is depend on the policy. In general, subsidy policy for poor community is ineffective, thus people makes an even redistribution according to main principle of Banjar Pakraman welfare system.

The dynamics of public welfare system in Banjar Pakraman is phenomenon of social changing. This dynamics occurs due to influence from state and free market which got response from Banjar Pakraman community, thus the free market become more dominant. The influence of free market had change public behaviors, thus improve the efficiency and effectiveness of custom activity.

Kata-kaat kunci:

Dinamika; sistem kesejahteraan; Banjar Pakraman; negara dan pasar.

Pengantar

Pascakrisis moneter di Indonesia terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Walaupun rezim pemerintahan telah berubah namun masalah kemiskinan tetap menjadi masalah penting yang tak kunjung selesai di negeri ini. Perubahan sistem pemerintahan yang sentralistis pada era orde baru menjadi desentralisasi pada era reformasi, seakan belum mampu menjawab permasalahan kemiskinan tersebut. Bertambahnya penduduk miskin di Indonesia memang bukan hanya bisa dilihat dari sisi kinerja pemerintah saja yang belum mampu menyejahterakan masyarakat, tetapi juga berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Krisis moneter ini berlanjut menjadi krisis multidimensi dan telah memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Laju inflasi yang cukup tinggi pada saat krisis telah membuat naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok.

Selain itu, naiknya harga minyak mentah dunia telah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi subsidi Bahan

Bakar Minyak (BBM) untuk mengurangi defisit anggaran. Di sisi lain adanya berbagai bencana yang melanda negeri ini juga ikut menambah panjang penderitaan masyarakat. Banyak penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda karena adanya bencana.

Bertambahnya jumlah penduduk miskin ini, membuat cita-cita negara untuk menyejahterakan masyarakat semakin jauh untuk diwujudkan. Namun demikian pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan. Berbagai kebijakanpun telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, mulai dari pemberian bantuan konsumtif untuk masyarakat maupun bantuan produktif. Namun, kebijakan tersebut pada implementasinya belum mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada. Bahkan kebijakan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru. Seperti adanya warga miskin saat pembagian BLT mengalami luka-luka, pingsan bahkan sampai meninggal dunia karena berdesak-desakan menunggu pembagian. Ada juga Kepala Desa yang didemo oleh warganya karena dianggap tidak adil menentukan warga miskin sehingga mereka tidak kebagian BLT, serta masih banyak kasus-kasus lainnya. Hal ini menunjukkan negara telah gagal menjalankan fungsinya untuk menyejahterakan rakyat.

Fenomena nasional ini tidak sedemikian paralel terjadi di Bali. Provinsi ini dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif lebih baik dari pada daerah-daerah lain di Indonesia. Terutama pada saat krisis, tingkat kemiskinan di Bali tidak menunjukkan peningkatan yang terlalu tajam. Bahkan ada kecenderungan bahwa masyarakat pedesaan di Bali lebih tahan terhadap kondisi krisis dari pada masyarakat perkotaan. Hal lain yang juga dapat menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Bali tidak menurun drastis adalah bahwa kegiatan-kegiatan adat dan keagamaan yang menghabiskan biaya dalam skala besar masih tetap dapat dilaksanakan seperti berbagai macam *yadnya*⁴, pemugaran *Pura*, *karya ngenteg linggih*⁵ di berbagai *Pura* dan lain sebagainya. Padahal kegiatan adat dan keagamaan tersebut biasanya dilaksanakan apabila masyarakat sanggup untuk membayar urunan.

4 *Yadnya* berarti korban suci yang tulus ikhlas. Dalam pelaksanaannya masyarakat menyumbangkan tenaga dan materi untuk dipakai melakukan *yadnya*.

5 *Karya ngenteg linggih* adalah upacara keagamaan yang dilaksanakan di *Pura* setelah selesai pembangunan *Pura* atau setelah selesai pemugaran atau perbaikan

Berpijak dari keadaan masyarakat Bali tersebut maka ketahanan masyarakat terhadap situasi krisis dapat menjadi penjabar bahwa ketika negara gagal untuk menyejahterakan masyarakat, maka perlu juga diperhatikan sistem kesejahteraan yang telah dimiliki oleh masyarakat sebelum adanya negara. Di mana sistem tersebut telah dipraktikkan dalam kurun waktu yang lama dan telah mengalami perubahan-perubahan karena perkembangan zaman.

Sistem kesejahteraan masyarakat biasanya dapat kita jumpai pada kehidupan masyarakat adat. Karena pada masyarakat adat relatif masih memiliki nilai-nilai asli yang diwarisi secara turun temurun. Untuk di Bali, sistem kesejahteraan masyarakat dapat dijumpai pada masyarakat *Banjar Pakraman*⁶ yang merupakan bagian dari *Desa Adat* atau *Desa Pakraman*⁷.

Dengan ikatan antarwarganya yang sangat erat, *Banjar Pakraman* memiliki suatu sistem untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sistem kesejahteraan masyarakat tersebut berupa nilai-nilai, norma, institusi-institusi adat, serta mekanisme tertentu yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan kesejahteraan yang dihadapi oleh masyarakat *Banjar Pakraman*. Sehingga masyarakat *Banjar Pakraman* tidak terlalu tergantung pada pihak luar untuk mewujudkan kesejahteraannya.

Namun demikian dengan adanya perkembangan jaman membuat sistem kesejahteraan masyarakat *Banjar Pakraman* tersebut mengalami perubahan. Apalagi dengan adanya arus globalisasi membuat *Banjar Pakraman* selalu mengalami interaksi dengan pihak luar. Selain itu sistem kesejahteraan yang dikembangkan oleh negara yang menyentuh ranah kehidupan masyarakat *Banjar Pakraman* juga telah mempengaruhi perubahan pada sistem kesejahteraan *Banjar Pakraman*, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem kesejahteraan masyarakat *Banjar Pakraman* mengalami suatu dinamika.

Dinamika sistem kesejahteraan masyarakat *Banjar Pakraman* merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti, karena sistem kesejahteraan merupakan salah satu modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat *Banjar Pakraman*. Di samping itu selama ini persoalan

6 Banjar Pakraman merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki ikatan yang sangat erat dan merupakan bagian dari Desa Pakraman,

7 Desa Pakraman diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001.

kesejahteraan masyarakat seakan dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah atau negara. Dari berbagai kajian yang ada, lebih banyak yang menekankan pada peningkatan kapasitas negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal saat ini kapasitas negara untuk menyejahterakan masyarakat masih sangat rendah. Pada kenyataannya justru masyarakatlah yang selalu berupaya untuk mewujudkan kesejahteraannya sendiri.

Di sini kajian mengenai sistem kesejahteraan masyarakat menjadi penting untuk digali, agar program peningkatan kesejahteraan yang akan dirancang dapat tepat sasaran. Selain itu dengan mendalami dinamika sistem kesejahteraan masyarakat akan dapat diketahui efektivitas sistem kesejahteraan sosial yang telah diterapkan selama ini. Sehingga ke depannya akan dapat dirumuskan suatu model sistem kesejahteraan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka penulis tertarik untuk meneliti dinamika sistem kesejahteraan masyarakat di *Banjar Pakraman* Batannyuh Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Karena *Banjar Pakraman* ini merupakan *Banjar Pakraman* yang masyarakatnya cukup sejahtera. Sebagian besar masyarakat *Banjar Pakraman* Batannyuh bekerja di sektor informal atau non-pemerintahan, yang artinya tidak bergantung pada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Masyarakat di *Banjar Pakraman* Batannyuh tidak ada yang menjadi pengangguran. Bahkan mereka mendatangkan tenaga kerja yang berasal dari luar *Banjar Pakraman* Batannyuh karena kekurangan tenaga kerja untuk memenuhi lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, hal yang juga menarik adalah sistem kesejahteraan masyarakat yang diwarisi dari zaman dahulu, masih ada yang diterapkan sampai sekarang, walaupun dengan modifikasi tertentu karena untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Bagaimanakah kemudian dinamika sistem kesejahteraan masyarakat di *Banjar Pakraman* Batannyuh ini terjadi ?

Pola Welfare System Banjar Pakraman

Dalam *Banjar Pakraman* Batannyuh terdapat beberapa pengorganisasian masyarakat yang menopang bekerjanya sistem kesejahteraan masyarakat. Dari lima pola pengorganisasian komunitas di Bali seperti yang ditulis oleh Ari Dwipayana (2005), dalam lingkup

Banjar Pakraman setidaknya terdapat tiga pengorganisasian masyarakat yang berperan dalam sistem kesejahteraan masyarakat. Pertama, *Banjar Pakraman* itu sendiri yang merupakan pengorganisasian masyarakat berdasarkan atas satu kesatuan tempat tinggal (wilayah/teritori), di mana *Banjar Pakraman* dibagi lagi menjadi *Keliran/Tempekan* yang merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil yang didasarkan pada deretan tempat tinggal (rumah). Kedua, *dadia* yaitu pengorganisasian masyarakat berdasarkan hubungan kekerabatan dan kesamaan asal usul keturunan agnatik (garis ayah). Instrumen yang selalu digunakan oleh organisasi *dadia* untuk membentuk keutuhannya adalah upacara di tempat pemujaan leluhur yang disebut Pura *Dadia*. Keanggotaan *dadia* tidak terkumpul dalam sebuah teritori tertentu melainkan menyebar lintas wilayah. *Dadia* memiliki sub kelompok yang susunannya mirip dengan *dadia* yang disebut *Sanggah Gede*. Ketiga, *sekehe* yang merupakan perkumpulan sukarela dan merupakan pengorganisasian masyarakat berdasarkan kelompok-kelompok kepentingan. *Sekehe* merupakan organisasi yang lebih bersifat ekonomis (Ari Dwipayana, 2005: 31).

Dengan keadaan pengorganisasian yang demikian, maka keanggotaan masyarakat *Banjar Pakraman* Batannyuh pada organisasi-organisasi tersebut bersifat keanggotaan silang (*cross cutting affiliation*). Hal ini terjadi karena dasar pengorganisasian yang dipakai berbeda. Masyarakat dapat saja menjadi *krama keliran*, anggota *dadia* dan juga anggota *sekehe*. Bahkan bisa menjadi anggota lebih dari satu *sekehe*.

Banjar Pakraman sebagai organisasi induk yang berbasis teritori melakukan fungsi membuat regulasi berupa *awig-awig banjar pakraman*, yang harus ditaati oleh seluruh *krama* dan organisasi masyarakat (*dadia* dan *sekehe*) yang ada dalam lingkup *banjar pakraman*. Nilai sosial yang melandasi *awig-awig* ini dikenal dengan istilah *menyama braya*, yaitu nilai hidup yang menganggap seluruh anggota masyarakat adalah saudara sehingga wajib untuk saling tolong menolong dan bergotong royong. Selain itu ada juga istilah *banjar suka duka* yang mempertegas kegiatan tolong menolong dan gotong royong yang dilakukan oleh *krama Banjar* dalam keadaan suka atau senang, maupun duka atau sedih. Dengan adanya kegiatan tolong menolong dalam suka dan duka ini, *Banjar Pakraman* melakukan sistem jaminan sosial terhadap *krama Banjar Pakraman*. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Slamet Ina (dalam Sumarnonugroho, 1991: 54)

yang menyatakan bahwa gotong royong pada hakikatnya mempunyai sifat timbal balik untuk saling membantu. Gotong royong memenuhi dua fungsi, yang satu bersifat jaminan sosial dan yang kedua bersifat pekerjaan umum.

Dalam kaitannya dengan pengaturan kesejahteraan bersama, *Banjar Pakraman* juga melakukan fungsi pengaturan redistribusi sumber daya. Prinsip dasar dari fungsi redistributif yang dijalankan oleh *Banjar Pakraman* adalah pembagian yang sama rata dan bersifat timbal balik antar *krama Banjar Pakraman*. Pembagian yang sama rata dalam arti redistribusi dilakukan secara sama rata kepada seluruh *krama* tanpa membedakan kondisi ekonomi masyarakat. Setiap *krama* dipandang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan sifat timbal balik dalam arti setiap *krama* berkewajiban untuk melakukan redistribusi sumber daya kepada *krama* yang lain, dan setiap *krama* berhak juga mendapatkan redistribusi dari *krama* yang lain.

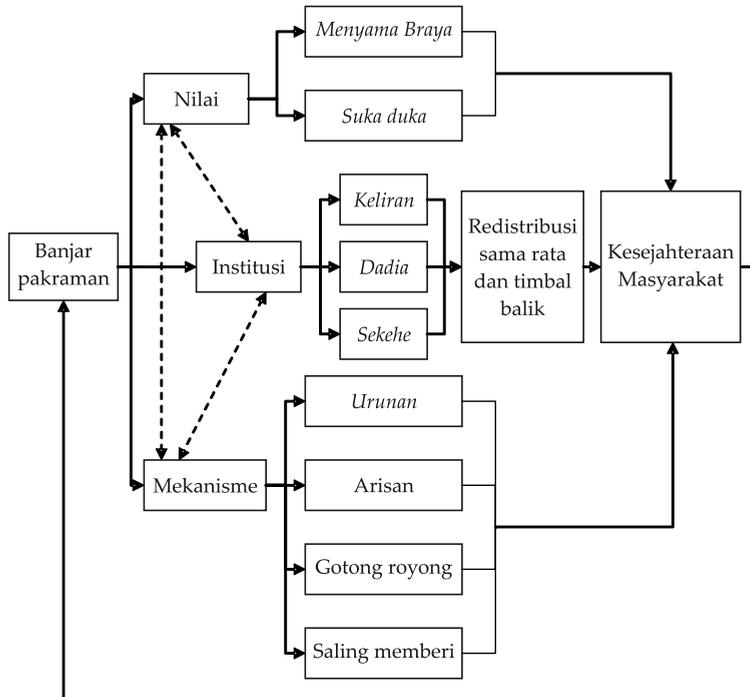
Banjar Pakraman juga mengatur tentang pekerjaan umum baik berupa pekerjaan fisik maupun nonfisik. Pekerjaan fisik seperti pembangunan Pura, *Bale Banjar* dan fasilitas umum lainnya. Pura sebagai tempat suci umat Hindu berfungsi untuk mencapai kesejahteraan yang bersifat rohani. *Bale banjar* merupakan tempat pertemuan bagi *krama Banjar* yang berfungsi sebagai tempat untuk membicarakan dan mencari solusi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh *Banjar Pakraman*. Sedangkan pekerjaan nonfisik meliputi berbagai kegiatan upacara adat dan keagamaan yang dilaksanakan dalam lingkup *Banjar Pakraman*. Pelaksanaan dan pembiayaan dari pekerjaan umum tersebut dilakukan oleh *Krama Banjar Pakraman*. Maka dalam hal ini *Banjar Pakraman* mengatur tentang besarnya urunan baik berupa materi maupun tenaga yang wajib diberikan oleh setiap *krama*. Besarnya urunan tersebut adalah sama bagi setiap *krama*, tanpa membedakan status ekonomi masyarakat.

Keliran memiliki fungsi untuk membantu kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan oleh *krama* yang termasuk anggota *Keliran* (berdasarkan teritori). Misalnya pada saat ada kematian pada salah satu anggota *Keliran*, maka anggota *keliran* yang lainnya membantu keluarga tersebut dalam upacara penguburan atau *ngaben*. Anggota *keliran* juga melakukan kegiatan menginap sebelum jenazah dikubur atau *diaben*. Hal ini merupakan wujud *responseveness* *Keliran* terhadap anggotanya.

Demikian juga halnya dengan *dadia* melakukan fungsi untuk membantu anggota *dadia* dalam melaksanakan kegiatan adat. Bahkan dibandingkan dengan *Keliran*, intensitas *dadia* lebih tinggi di dalam membantu. Karena *Keliran* memiliki sistem komando, sedangkan *dadia* berdasarkan pada hubungan kekeluargaan.

Sekehe lebih bersifat ekonomis, karena keanggotaannya yang didasarkan pada kepentingan tertentu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *sekehe* lebih didasarkan pada komitmen bersama anggota *sekehe*. *Sekehe* berfungsi untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya melalui usaha-usaha bersama yang dilakukan oleh *sekehe*.

Untuk lebih jelas mengenai sistem kesejahteraan yang dimiliki oleh *Banjar Pakraman* dapat digambarkan seperti skema dibawah ini:



Gambar 1
Skema Sistem Kesejahteraan Banjar Pakraman

Skema di atas menunjukkan bahwa *Banjar Pakraman* memiliki nilai, institusi dan mekanisme yang merupakan bagian dari sistem kesejahteraan masyarakat. Antara nilai, institusi dan mekanisme ini saling berinteraksi sehingga menggerakkan sistem kesejahteraan masyarakat. Pada level nilai, terdapat nilai *menyama braya* dan *suka duka* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada level institusi, terdapat *Keliran* yang merupakan bagian dari *Banjar Pakraman*, *Dadia* dan *Sekehe* yang penjelasannya sudah disinggung sebelumnya. *Keliran*, *Dadia* dan *Sekehe* ini merupakan institusi yang memiliki fungsi redistribusi. *Keliran* melakukan redistribusi terhadap kelompok masyarakat berdasarkan teritori (masyarakat sekitarnya). *Dadia* melakukan redistribusi terhadap kelompok yang masih memiliki pertalian darah (saudara). *Sekehe* melakukan redistribusi terhadap kelompok yang memiliki kepentingan yang sama seperti profesi yang sama, hobi yang sama, dan lain sebagainya. Pada level mekanisme terdapat berbagai cara untuk melakukan redistribusi, seperti urunan, arisan, gotong royong dan saling memberi baik materiil maupun nonmateriil. Prinsip dasar dari bekerjanya nilai, institusi dan mekanisme tersebut adalah redistribusi yang sama rata dan timbal balik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama masyarakat *Banjar Pakraman*.

Prinsip dasar redistribusi yang sama rata ini di satu sisi menyebabkan *krama* merasa memiliki kedudukan yang sama, sehingga memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan melaksanakan kewajibannya sebagai *krama Banjar Pakraman*. Namun di sisi lain dengan prinsip redistribusi yang sama rata ini, menyebabkan *Banjar Pakraman* tidak memiliki sistem yang dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Akibatnya masyarakat miskin akan memikul beban yang sama dengan masyarakat yang mampu, sehingga bisa menyebabkan keadaan mereka semakin terpuruk. Namun demikian semuanya kembali pada kemampuan *krama* dalam menyikapi kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh *Banjar Pakraman*. Bagi *krama* yang memiliki kemampuan mengelola beban tersebut menjadi motivasi, maka akan membuat mereka mampu meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan bagi *krama* yang tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola beban menjadi motivasi maka keadaannya semakin terpuruk dengan adanya beban adat yang harus mereka tanggung, selain beban ekonomi.

Sistem kesejahteraan ini bekerja melalui kegiatan-kegiatan adat dan kegiatan di luar adat (kegiatan sehari-hari masyarakat). Namun yang sekarang masih banyak dijumpai adalah pada kegiatan adat. Dalam setiap kegiatan adat setidaknya masih terdapat bantuan dari *krama* kepada *krama* yang lainnya. Bantuan tersebut menjadi semacam menjadi tabungan (*saving*) yang nantinya akan kembali apabila *krama* tersebut juga menyelenggarakan kegiatan adat.

Kegiatan adat ada yang melibatkan seluruh *krama Banjar* dan ada yang hanya melibatkan sebagian *krama* saja. Kegiatan yang melibatkan seluruh *krama Banjar* meliputi kegiatan umum dan kegiatan adat kematian. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya tidak memerlukan bantuan yang besar biasanya hanya melibatkan kelompok yang lebih kecil seperti *keliran/tempekan* dan *dadia* saja. Bahkan ada pula kegiatan-kegiatan yang hanya melibatkan *pisaga* atau tetangga saja. Khusus mengenai *pisaga* ini, bagi masyarakat Batanyuh memiliki peranan yang sangat penting, karena dianggap sebagai saudara terdekat yang sewaktu-waktu dapat memberikan bantuan. Setiap rumah memiliki jalan dalam rumah yang menghubungkan setiap rumah *krama* dengan tetangga, untuk memudahkan akses ke tetangga.

Semua kegiatan adat tersebut berlandaskan pada pengaturan yang dilakukan oleh *Banjar Pakraman* baik berupa *awig-awig* maupun *perarem*. Seperti *Keliran* melakukan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam *awig-awig Banjar Pakraman*. *Keliran* berperan juga melakukan redistribusi sumber daya kepada anggota *Keliran*. Di dalam *keliran* ini terjadi kegiatan saling membantu antar *krama keliran* dalam kegiatan adat, keagamaan dan kegiatan sosial lainnya. Wujud dari bantuan antar *krama keliran* ini berupa tenaga dan materi. Misalnya apabila ada anggota *keliran* yang sedang melaksanakan upacara adat maka *krama keliran* yang lain datang untuk membantu kegiatan adat tersebut dengan membawa bambu, *klangsah*⁸, janur, beras, gula, buah kelapa, telur dan sayur. Sebagai imbalan dari bantuan yang telah diberikan tersebut maka *krama keliran* diberikan makan oleh *krama* yang mempunyai kegiatan adat tersebut. Proses ini berlangsung terus menerus dan bersifat timbal balik bagi *krama Keliran*.

8 Klangsah adalah anyaman daun kelapa yang dapat dipakai menjadi atap ataupun pagar.

Kemudian *dadia* melakukan fungsi redistribusi. Redistribusi yang dilakukan oleh *dadia* juga berpatokan pada ketentuan yang diatur dalam *awig-awig banjar pakraman*. Redistribusi lebih banyak dilakukan berkaitan dengan kegiatan adat dan yang didistribusikan adalah lebih banyak berbentuk makanan.

Dalam masyarakat *Banjar Pakraman* selain sistem kesejahteraan yang dimiliki oleh *Banjar Pakraman* (komunitas) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga terdapat sistem kesejahteraan negara dan pasar yang menyentuh kehidupan masyarakat. Sistem kesejahteraan negara menyentuh kehidupan masyarakat melalui program-program pemerintah yang dijalankan oleh institusi pemerintahan formal seperti desa dinas. Sedangkan sistem pasar masuk ke *Banjar Pakraman* melalui arus globalisasi yang hampir melanda seluruh masyarakat di dunia. Ketiga sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sistem pasar bekerja dengan prinsip persaingan/kompetisi, sistem kesejahteraan negara bekerja dengan prinsip dasar subsidi bagi masyarakat yang lemah/miskin dan sistem kesejahteraan *Banjar Pakraman* bekerja dengan prinsip dasar distribusi yang sama rata.

Secara ideal ketiga sistem seharusnya dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat apabila sistem-sistem tersebut bekerja saling melengkapi. Ketika persaingan/kompetisi dalam sistem pasar menimbulkan kelompok miskin akibat kalah dalam persaingan maka sistem negara diharapkan dapat memberikan subsidi kepada kelompok miskin tersebut, dan komunitas diharapkan juga dapat melakukan redistribusi terhadap kelompok tersebut. Ketika negara belum mampu menciptakan kesejahteraan, maka sistem pasar dan komunitas dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Ketika sistem komunitas belum dapat menciptakan kesejahteraan bersama maka sistem pasar dan negara diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya ketiga sistem tersebut tidak dapat bekerja saling melengkapi. Sistem pasar telah menimbulkan masyarakat miskin karena kalah dalam persaingan/kompetisi. Subsidi yang seharusnya diberikan oleh negara terhadap kelompok miskin tidak tepat sasaran, sehingga tidak semua kelompok miskin memperoleh subsidi dari negara. Sedangkan sistem kesejahteraan komunitas dengan redistribusi yang sama rata dan timbal balik tidak dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

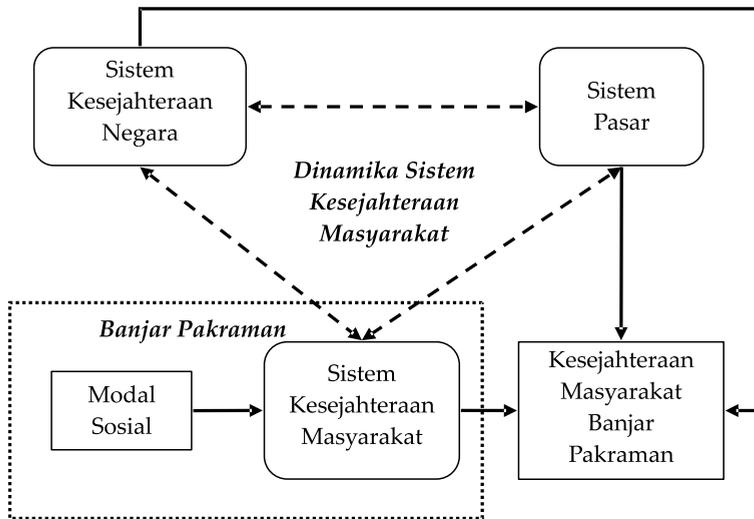
Saat ini logika pasar telah mewarnai sebagian besar kehidupan masyarakat, di mana segala pemenuhan kebutuhan masyarakat diperoleh dengan sistem jual beli. Dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan, usaha-usaha bersama yang dilakukan masyarakat juga bergeser menjadi usaha-usaha yang bersifat individualistis. Kegiatan gotong-royong dalam melakukan suatu pekerjaan yang bersifat ekonomis, telah bergeser menjadi sistem pengupahan buruh. Kegiatan adat yang dilaksanakan mengalami perubahan dan dimodifikasikan dengan orientasi efisiensi.

Logika pasar ini juga berpengaruh terhadap sistem kesejahteraan masyarakat yang dimiliki oleh *Banjar Pakraman*. Beberapa mekanisme dalam sistem kesejahteraan masyarakat mengalami perubahan mengikuti logika pasar. Hal ini membuat beberapa mekanisme sistem kesejahteraan tidak lagi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat *Banjar Pakraman*. Beberapa mekanisme sistem kesejahteraan bahkan mengalami pergeseran hanya menjadi kegiatan adat yang bertujuan untuk mempertahankan tradisi saja.

Di sisi lain sistem kesejahteraan dari negara juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat *Banjar Pakraman*. Namun sistem kesejahteraan negara memiliki bentuk yang berbeda dengan sistem pasar. Sistem kesejahteraan negara berbentuk dalam berbagai subsidi bagi masyarakat miskin dan adanya bantuan produktif untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Karena bentuknya yang lebih konkret, maka sistem yang diterapkan oleh negara ini mendapat reaksi yang lebih jelas dari masyarakat dibandingkan dengan reaksi terhadap sistem pasar. Prinsip dasar yang dalam sistem kesejahteraan masyarakat yang berupa redistribusi yang bersifat sama rata berpengaruh terhadap sikap masyarakat, sehingga masyarakat sulit untuk menerima adanya subsidi kepada sebagian masyarakat. Masyarakat lebih cenderung menginginkan adanya subsidi yang sama rata. Selain itu adanya subsidi yang tidak tepat sasaran juga mempengaruhi sikap masyarakat tersebut. Untuk lebih memperjelas pola interaksi masyarakat *Banjar Pakraman* dengan kebijakan kesejahteraan negara, maka dapat diketahui dengan melihat beberapa kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat *Banjar Pakraman* Batannyuh.

Dinamika Welfare System Banjar Pakraman

Dinamika sistem kesejahteraan masyarakat *Banjar Pakraman* merupakan hasil dari interaksi atau pergulatan yang terjadi antara sistem kesejahteraan *Banjar Pakraman* dengan Negara dan Pasar. Negara dan pasar melakukan intervensi terhadap sistem kesejahteraan *Banjar Pakraman*, yang kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat *Banjar Pakraman*. Oleh karena itu faktor utama yang menyebabkan terjadinya dinamika sistem kesejahteraan masyarakat *Banjar Pakraman* tidak terlepas dari peran negara dan pasar. Untuk lebih jelasnya, intervensi negara dan pasar terhadap masyarakat Banjar Pakraman yang mengakibatkan terjadinya dinamika sistem kesejahteraan *Banjar Pakraman* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Dinamika Sistem Kesejahteraan Banjar Pakraman

Gambar di atas menunjukkan bahwa negara dan pasar merupakan kekuatan yang berasal luar *Banjar Pakraman* yang melakukan intervensi terhadap *Banjar Pakraman*, dengan memasukkan sistem kesejahteraan yang baru ke dalam *Banjar Pakraman*. Sedangkan dalam masyarakat sendiri sudah ada sistem kesejahteraan. Sistem kesejahteraan yang baru tersebut, kemudian mendapat reaksi dari masyarakat Banjar Pakraman

berupa filterisasi dan modifikasi, sehingga sistem tersebut tidak serta merta menggantikan sistem kesejahteraan yang telah ada. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kebijakan subsidi untuk rakyat miskin dari pemerintah yang bersifat *top down*, dimodifikasi oleh *Banjar Pakraman* menjadi *bottom-up*, sehingga implementasinya berbeda dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Demikian juga halnya dengan sistem pasar yang memandang manusia melulu sebagai *homo economic* dimodifikasi oleh *Banjar Pakraman* sehingga pandangan tersebut tidak seluruhnya dapat berlaku dalam hubungan antar *krama Banjar Pakraman*.

Proses filterisasi dan modifikasi yang dilakukan oleh *Banjar Pakraman* terhadap kebijakan pemerintah mengakibatkan terjadinya pergeseran implementasi, sehingga kebijakan yang dirancang *pro poor* setelah didistribusi ulang oleh *Banjar Pakraman* menjadi tidak *pro poor*. Hal ini mengakibatkan subsidi yang diterima oleh masyarakat miskin sama dengan masyarakat yang tidak miskin. Proses filterisasi dan modifikasi yang dilakukan *Banjar Pakraman* terhadap sistem pasar mengakibatkan sistem pasar tidak seluruhnya berlaku pada kehidupan *Banjar Pakraman*. Dalam masyarakat masih ada tolong menolong dan gotong royong, walaupun intensitasnya tidak sesering pada masa lalu dan ruang lingkungannya hanya terbatas pada kegiatan adat.

Adanya sistem negara dan pasar yang masuk ke dalam *Banjar Pakraman* yang menyebabkan terjadinya dinamika sistem kesejahteraan masyarakat, telah menciptakan model sistem kesejahteraan masyarakat yang baru. Model ini merupakan penggabungan dari sistem kesejahteraan masyarakat, negara dan pasar, di mana masing-masing sistem ini memiliki porsi dominasi tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem kesejahteraan negara berperan dalam bidang penyediaan pendidikan formal dan kesehatan dalam masyarakat. Sistem pasar berperan dalam bidang pangan, perumahan, pendapatan dan pekerjaan. Sedangkan sistem kesejahteraan *Banjar Pakraman* berperan dalam bidang kesejahteraan yang bersifat rohani (*spritual*), karena menyangkut rasa saling percaya dan perasaan aman.

Masuknya sistem negara dan pasar ke dalam *Banjar Pakraman* dalam konteks *Banjar Pakraman* Batanyuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara garis besar faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor eksternal dan internal masyarakat. Faktor eksternal meliputi:

informasi komunikasi yang meliputi pengaruh media massa dengan bentuk industri pers, birokrasi sebagai agen dan implemantor berbagai kebijakan negara yang menyentuh *Banjar Pakraman*, ideologi baru baik agama maupun faham tertentu, modal yang meliputi modal finansial dan SDM dan kemajuan teknologi terutama teknologi komunikasi jarak jauh yang semakin canggih. Sedangkan faktor internalnya antara lain adalah bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi, semakin beragamnya mata pencaharian dan semakin kompleksnya kebutuhan hidup masyarakat.

Kesimpulan

Modal sosial berfungsi untuk mengatasi berbagai macam hambatan kolektif dalam sebuah masyarakat, termasuk masalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Melalui perilaku kerja sama, sinergi, *mutual acquaintance and recognition* masyarakat berupaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga menciptakan kesejahteraan bersama. *Banjar Pakraman* sebagai suatu komunitas memiliki modal sosial berupa nilai, mekanisme dan institusi yang dibentuk oleh *Banjar Pakraman* untuk mengatasi berbagai permasalahan terutama menyangkut kesejahteraan. Oleh karena itu *Banjar Pakraman* memiliki sistem kesejahteraan tersendiri.

Nilai-nilai yang melandasi sistem kesejahteraan *Banjar Pakraman* berupa *menyama braya* dan *suka duka*. Nilai ini menganggap *krama* yang lain sebagai saudara sehingga wajib saling tolong-menolong. Nilai ini sampai sekarang masih tetap eksis walaupun kadarnya mengalami penurunan, karena diatur dalam *awig-awig* yang ditaati oleh masyarakat. Dalam level institusi ada tiga pengorganisasian yang berperan yaitu *Keliran*, *Dadia* dan *Sekehe*. Sedangkan mekanisme yang dilaksanakan berupa gotong royong, urunan, arisan dan saling memberi. Prinsip dasar dari sistem kesejahteraan *Banjar Pakraman* adalah redistribusi yang sama rata tanpa membedakan kondisi ekonomi masyarakat. Sehingga sistem kesejahteraan tersebut tidak memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat miskin.

Dalam perkembangannya sistem kesejahteraan *Banjar Pakraman* mengalami dinamika. Dinamika yang terjadi pada sistem kesejahteraan masyarakat merupakan suatu fenomena perubahan sosial yang tidak dapat dihindari. Perubahan sosial (*social change*) memiliki ciri yaitu berlangsung

terus menerus dari waktu ke waktu, tanpa dapat direncanakan. Perubahan adalah proses yang wajar, alamiah sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Perubahan mencakup suatu sistem sosial, dalam bentuk organisasi sosial yang ada di masyarakat. Perubahan dapat terjadi lambat, sedang atau keras tergantung situasi (fisik, buatan, atau sosial) yang mempengaruhinya.

Dinamika yang terjadi pada Sistem Kesejahteraan masyarakat *Banjar Pakraman* Batannyuh merupakan akibat dari interaksi dengan sistem kesejahteraan negara dan pasar. Dalam hal ini pasar memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap sistem kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan negara. Namun pengaruh pasar ini juga ditentukan oleh sistem politik ekonomi yang dianut oleh negara. Pada saat negara menganut sistem politik ekonomi sosialis, sistem kesejahteraan masyarakat *Banjar Pakraman* sangat kuat peranannya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat bersama. Kemudian pada saat sistem politik ekonomi negara beralih ke arah liberalis, dengan membuka lebar pintu bagi masuknya kapital asing dan pasar global maka secara perlahan-lahan sistem kesejahteraan masyarakat *Banjar Pakraman* juga mengalami perubahan atau penyesuaian, sehingga sistem kesejahteraan masyarakat perlahan-lahan berubah mengikuti logika pasar.

Perubahan atau penyesuaian tersebut merupakan reaksi dan fiterisasi yang dilakukan oleh masyarakat *Banjar Pakraman* terhadap masuknya sistem negara dan pasar. Sistem kesejahteraan negara dan pasar tidak seluruhnya diterima oleh masyarakat *Banjar Pakraman*, melainkan dimodifikasi lagi sehingga melahirkan model sistem kesejahteraan yang baru. Model ini merupakan penggabungan dari sistem kesejahteraan masyarakat, negara dan pasar.

Perubahan sistem kesejahteraan masyarakat terjadi pada level nilai, institusi dan mekanisme. Namun dari ketiga hal tersebut yang paling menonjol terlihat adalah pada level mekanisme. Berbagai kegiatan adat dirancang dengan prinsip efektivitas dan efisiensi, yang merupakan prinsip dari sistem pasar. Oleh karena itu, sampai saat ini ada beberapa subsistem kesejahteraan yang tidak lagi dianggap sebagai sistem kesejahteraan seperti *ngejot* yang justru dianggap sebagai beban bagi masyarakat, karena tidak efektif dan efisien. Masyarakat kemudian melakukan perubahan terhadap sistem tersebut, melalui kesepakatan

bersama. Perubahan yang terjadi merupakan hasil dari kesepakatan diantara *krama* yang diputuskan melalui *sangkepan* (rapat) *Banjar Pakraman*.

Sistem Kesejahteraan yang dikembangkan oleh negara melalui berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah masih belum dapat mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah masih banyak yang belum tepat sasaran. Selain itu *Banjar Pakraman* sendiri memiliki mekanisme tersendiri dalam menyikapi bantuan tersebut. Sehingga kebijakan pemerintah tidak dapat diimplementasikan dengan baik yang menyebabkan gagalnya kebijakan tersebut mengatasi persoalan yang ada.*****

Daftar Pustaka

A. BUKU / LITERATUR

Ari Dwipayana, AAGN. (2005). *Desa Mawa Cara - Problematika Desa Adat di Bali*. Yogyakarta: IRE.

Ari Dwipayana, AAGN. (2005). *Globalism: Pergulatan Politik Representasi atas Bali*. Denpasar: Uluangkep Press.

Sumarnonugroho, T. (1991). *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: PT. Hanindita.